

ABSTRAK

Aprillio Wicaksono. 1712143011. “*Penanganan Dinas Sosial Terhadap Mantan Pekerja Seks Komersial (PSK) Dari Eks Lokalisasi Semampir Kediri Yang Terdampak Oleh Pelaksanaan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dalam Daerah Kotamadya Kediri Ditinjau Menurut Hukum Islam*” Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Dosen pembimbing: Indri Hadisiswati S.H., M.H.

Kata kunci: Landasan, Pelaksanaan, Lokalisasi

Lokalisasi adalah tempat dimana terpusatnya praktik transaksi jual beli antara PSK (Pekerja Seks Komersial) dan orang-orang yang membutuhkan jasa dari PSK tersebut. Tempat ini merupakan sebuah pilihan bagi para laki-laki yang biasanya memiliki hasrat seksual yang begitu tinggi yang belum tersalurkan dengan baik. Penutupan lokalisasi terlihat tidak efektif dalam rangka membasi praktik prostitusi karena banyak sebab yang melatarinya, di antaranya persoalan dasar yang dihadapi PSK tidak terselesaikan dengan ditutupnya tempat lokalisasi, justru dengan penutupan tempat lokalisasi membuat keberadaan PSK bisa terdistribusi rata di tempat-tempat strategis. Peran yang sangat penting dalam masalah ini adalah Dinas Sosial yang mana badan tersebut yang memiliki hak dalam menangani persoalan yang timbul terkait adanya penggusuran lokalisasi tersebut. Karena pada praktiknya adanya lokalisasi tersebut beroperasi dikarenakan kebutuhan ekonomi bagi para pekerja seks komersial. Apabila tempat para pekerja seks komersial tersebut di gusur, maka secara otomatis pada saat itu juga para pekerja seks komersial itu tidak memiliki pekerjaan dikarenakan kurangnya keterampilan dan kesempatan mendapatkan pekerjaan.

Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana landasan hukum penggusuran lokalisasi Semampir Kediri menurut Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 26 Tahun 1998 ? 2) Bagaimana pelaksanaan program dinas sosial terhadap para mantan PSK? 3) Bagaimana penggusuran lokalisasi Semampir Kediri menurut kajian hukum islam?

Pendekatan dan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Lokasi penelitian ini berada di Kota Kediri, lebih tepatnya berada di daerah bekas lokalisasi Semampir Kediri kelurahan Semampir. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Studi kepustakaan/studi dokumen (*documentary study*), Wawancara mendalam (*interview*) Pengamatan (*observasi*)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Lokalisasi Semampir Kediri secara sah telah di gusur sesuai dengan landasan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 26 Tahun 1998 tentang pemberantasan pelacuran dalam kota Kediri. 2) Pelaksanaan program Dinas Sosial telah berjalan dengan baik. Para PSK telah diberikan pelatihan-pelatihan serta uang kerakhiman guna untuk persiapan hidup bermasyarakat. 3) Penggusuran lokalisasi Semampir Kediri telah sesuai dengan prinsip hukum islam. Pemerintah tidak begitu tidak begitu saja menggusur lokalisasi, namun tetap memperhatikan nasib dari para PSK.

Abstrack

Aprillio Wicaksono. 1712143011. "*The handling of the Social Department towards Commercial Sex Workers (CSW) Former From Ex Localization of Semampir Kediri which Affected by the Implementation of Perda Kotamadya Region II Kediri Number 26 Year 1998 About Eradication of Prostitution In Regional Kediri Reviewed by Islamic Law*" Thesis. Islamic Family Law Department. Faculty of Shariah and Law Studies of the State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung. Supervisor: Indri Hadisiswati S.H., M.H.

Keywords: Platform, Implementation, Localization

Localization is a place where the centralized practice of buying and selling transactions between commercial sex workers (CSW) and people who need services from the CSW. This place is an option for men who usually have a high sexual desire that has not been delivered properly. The closure of localization appears to be ineffective in eradicating prostitution because of many reasons. Among them, the basic problems faced by CSWs are not resolved by the closing of localization sites, precisely with the closure of localization sites making the existence of CSWs can be distributed evenly in strategic places. A very important role in this issue is the Social Department which the agency has the right to deal with issues arising in relation to the eviction of the localization. Because in practice the localization operates due to the economic need for commercial sex workers. If the place of commercial sex workers is evicted, then automatically at that time the commercial sex workers do not have jobs due to lack of skills and opportunities to get a job.

The formulation of the problem in this research are: 1) How is the legal basis for evicting the localization of Semampir Kediri according to the Regional Regulation of Kediri Regional Level II Number 26 Year 1998? 2) What is the implementation of social Department programs for the PSK formers? 3) How is the eviction of the Semampir Kediri localization according to Islamic legal principles?.

This research uses qualitative research method with field research approach. This research was conducted in Kediri, especially located in the area of ex localization Semampir Kediri. While, the data collection techniques used in this study is in the form of literature study.

The results of this study indicate that: 1) Localization of Semampir Kediri has been legally evicted based on Perda Kotamadya Region II Kediri Number 26 of 1998 on eradication of prostitution within the city of Kediri. 2) Implementation of Social Department's program has been running well. The CSWs have been given training and money for the preparation of community life. 3) The eviction of localization Semampir Kediri has been in accordance with Islamic legal principles. The government is not so simply displacing the localization, but still pay attention to the fate of the CSWs.